



---

# **RENCANA KERJA**

*Tahun 2018*

---



---

***Dinas Koperasi, Usaha Kecil,  
Menengah  
& Perdagangan***

**Kota Bontang  
Propinsi Kalimantan Timur**

---



---

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayahnya Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan dapat menyelesaikan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Tahun 2018 yang merupakan penjabaran dari menyelesaikan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Bontang Tahun 2016 - 2021.

Dalam Rencana Kerja ini, kami berupaya untuk konsisten terhadap agenda pembangunan dalam rangka menguatkan Bontang sebagai kota maritim berkebudayaan industri yang bertumpu pada kualitas sumber daya manusia dan lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat. Guna mendukung Visi tersebut, maka Misi Walikota Bontang yang diemban Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Bontang adalah menjadikan Kota Bontang sebagai *Creative City* melalui Pengembangan kegiatan perekonomian berbasis sektor maritim; dimana Bontang sebagai *Creative City* merupakan hasil dari pengembangan pengetahuan yang intensif dan strategi kreatif dalam peningkatan kualitas sosial-ekonomi, ekologi, daya kompetitif kota.

Semoga dengan telah tersusunnya RENJA SKPD ini, pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu tahun 2018 dapat dilaksanakan secara efektif dan seefisien mungkin baik aspek pengukuran kinerja kegiatan maupun dari aspek keuangan, sehingga dampak yang diharapkan adalah terwujudnya peningkatan pertumbuhan ekonomi secara signifikan dan berhubungan langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ditetapkan di :  
Bontang  
Tanggal : Juni  
2017



**Kepala Dinas  
Koperasi, UKM dan Perdagangan  
Kota Bontang**

**Ir. Mursyid, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610703 198603 1 016

**DAFTAR ISI**

SAMPUL	
KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR ISI.....	
BAB I	PENDAHULUAN.....
	I.1. Latar Belakang.....
	I.2. Landasan Hukum.....
	I.3. Maksud dan Tujuan.....
	I.4. Sistematika Penulisan.....
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN TAHUN LALU .....
	II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra.....
	II.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.....
	II.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.....
	II.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....
	II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....
BAB III	TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN.....
	III.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....
	III.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD.....
	III.3. Program dan Kegiatan.....



- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan  
Hidup Strategis.....
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.....

BAB IV PENUTUP.....

Lampiran.....

Tabel II.2.1 .....Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD s/d Tahun  
Berjalan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Bontang.....

Tabel II.4.1 .....Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018

Tabel II.4.2 .....Rumusan Kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun 2018 Hasil  
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....

Tabel III.3.1 .....Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan  
Perkiraan Maju Tahun 2019 Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan  
Kota Bontang.....

## Lampiran

Tabel II.2.1 .....Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD s/d Tahun  
Berjalan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Bontang

Tabel II.4.1 .....Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018

Tabel II.4.2 .....Rumusan Kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun 2018 Hasil  
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Tabel III.3.1 .....Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan  
Perkiraan Maju Tahun 2019 Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan  
Kota Bontang



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1. LATAR BELAKANG**

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Daerah, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk kurun waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk perencanaan pembangunan tahunan.

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, RKPD sekurang-kurangnya memuat tentang kerangka ekonomi daerah,



program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun sumber-sumber lain. Penetapan program prioritas berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkesinambungan serta berkelanjutan,

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah kota maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif. Rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2018 sebagai bahan untuk penyusunan Rancangan RKPD Pemerintah Kota Bontang Tahun 2018. Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Rancangan Renja SKPD, adalah sebagai berikut:

- a) Mengacu pada rancangan awal RKPD Tahun 2018, yang digunakan sebagai acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif dalam Renja SKPD Tahun 2018, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD Tahun 2018.
- b) Mengacu pada Renstra SKPD Tahun 2017 - 2021, sebagai acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja SKPD, selaras dengan Renstra SKPD.
- c) Mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, sebagai acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra SKPD berdasarkan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.



- d) Untuk memecahkan masalah yang dihadapi, sebagai acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja SKPD, beserta dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.
- e) Memasukkan usulan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan yang terkait dengan SKPD, sebagai acuan perumusan kegiatan dalam rancangan Renja SKPD, mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPD.

Beberapa upaya untuk mensinergikan program dan kegiatan di tahun 2018 diantaranya melalui inventarisasi data, permasalahan, dan potensi yang ada. Selain itu juga dilakukan diskusi dalam berbagai forum antara lain Forum SKPD dan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) melibatkan unsur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Instansi Vertikal di Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Pakar Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Asosiasi Profesi.

Penyusunan Renja SKPD Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Bontang Tahun 2018 berdasarkan dengan tupoksi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Bontang (Perda No. 2 Tahun 2016). Agar Renja ini tepat sasaran dan hasil akhirnya bermuara kepada tercapainya visi dan misi Kepala daerah. Diharapkan dengan disusunnya Renja ini sebagai perwujudan nyata tanggung jawab dan peran serta pemerintah dalam urusan wajibnya ( Lampiran A.I.a Permendagri 59 tahun 2007) mengenai Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

## **I.2. LANDASAN HUKUM**

Rencana Kerja (Renja) SKPD Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Bontang disusun atas dasar landasan dan sejumlah peraturan sebagai berikut:

1. Landasan Idiil : Pancasila
2. Landasan Konstitusional : UUD 1945



3. Landasan Filosofis : Bhineka Tunggal Ika
4. Landasan Visional : Negara Kesatuan Republik Indonesia
5. Landasan Operasional: Menyangkut peraturan perundangan yaitu:
  1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286).
  2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
  4. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437).
  5. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
  6. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
  7. Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
  8. Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4124.
  9. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.





10. Peraturan Presiden No. 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014.
11. Peraturan Menteri dalam negeri No. 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam negeri no. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Tata Cara Musrenbang ( Lampiran VI, Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah )
13. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Walikota Bontang Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan;
15. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang Tahun 2016-2021;

### **I.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Renja SKPD Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Bontang 2018 disusun dengan maksud untuk menjadikan acuan ke masa depan, baik untuk Pemerintah Kota Bontang pada umumnya maupun Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Bontang pada khususnya yang nantinya akan menjadi dasar penyusunan RKA, sebagai bahan tersusunnya DPA yang merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan disusunnya Renja SKPD Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Bontang adalah :

- a. Meningkatkan Peran Sektor Non Migas dalam Struktur Ekonomi Daerah
- b. Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kota Bontang

### **I.4. SISTEMATIKA PENULISAN**





## **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

## **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD**, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

**2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD**, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan

**2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD**, berisikan uraian mengenai Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD,



#### **2.4. Review terhadap Rancangan Awal**

**2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.** Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan

### **BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN**

**3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional,** telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD

**3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD,** perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD

**3.3. Program dan Kegiatan,** berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

### **BAB IV PENUTUP**



Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

## **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN TAHUN LALU**

### **II.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA**

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Bontang Tahun 2016, maka evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Bontang Tahun 2016 dan capaian Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Bontang Tahun 2011-2016 adalah sebagai berikut :

**Misi I** “Mengembangkan industri yang berdaya saing global bertumpu pada potensi sumber daya lokal yang berkelanjutan dan ramah lingkungan”



Pencapaian sasaran pada Misi I pada Tahun Anggaran 2016 adalah 100% diperoleh dari tercapainya target dari indikator sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Tahun Anggaran 2016, uraian semua indikator sasaran adalah sebagai berikut :

1. Persentase pertumbuhan industri

Dari target 2,16% pertumbuhan IKM yang ditargetkan Tahun 2016 dapat terealisasi sebesar 6,54% sehingga indikator sasaran ini persentase rencana tingkat capaiannya sebesar 302,8%, hal ini diperoleh dari munculnya IKM baru hasil pendataan dan pendampingan yang dilakukan oleh Seksi ILMEA dan IKAHH.

2. Meningkatnya kelurahan yang memiliki produk OVOP.

Dari target 1 kelurahan dalam tahun 2016, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan dapat merealisasikan sebanyak 1 produk untuk 1 kelurahan, sehingga indikator sasaran ini persentase rencana tingkat capaiannya 100%.

3. Jumlah kelurahan yang mendapatkan aliran gas rumah tangga

Target 1 kelurahan realisasi 1 kelurahan, capaian kinerja sebesar 100%. Meskipun untuk tahun 2016 pemasangan jaras sudah tidak ada lagi tapi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan tetap memfasilitasi pemenuhan kebutuhan gas ini.

4. Jumlah lokasi pemanfaatan energi listrik dari PLTS Komunal

Dari target 5 lokasi tahun 2016, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan dapat merealisasikan 5 lokasi sehingga capaiannya sebesar 100%.

**Misi II** “Mengembangkan sentra dan produk unggulan lokal”

Pencapaian sasaran pada Misi II pada Tahun Anggaran 2016 ditengah pelaksanaannya terjadi pemangkasan anggaran sehingga kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang direncanakan, di Renstranya sendiri sudah direvisi sehingga kegiatannya tidak jadi dimunculkan.



**Misi III** “Mengembangkan sistem perdagangan yang efisien, efektif dan pro rakyat”

Pencapaian sasaran pada Misi III pada Tahun Anggaran 2016 adalah 100% diperoleh dari tercapainya target dari indikator sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Tahun Anggaran 2016, uraian semua indikator sasaran adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan nilai ekspor  
Target 3.022 (milion \$) dapat terealisasi sebesar 3.022 (milion \$) sehingga capaiannya 100%. Keberhasilan ini dapat diperoleh dari data penerbitan surat keterangan asal (SKA) yang diperoleh dari Seksi PLN.
2. Cakupan ketersediaan 23 komoditi  
Target 23 komoditi dapat terealisasi sebesar 23 komoditi sehingga capaiannya 100%.

**Misi IV** “Mewujudkan kemandirian koperasi & UMKM berbasis ekonomi kerakyatan”.

1. Persentase koperasi yang aktif  
Dari target koperasi aktif 85% tahun 2016, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan dapat merealisasikan 83,75% sehingga capaiannya 98,5%. Capaiannya yang kurang dari 100% disebabkan karena adanya 1 koperasi yang sudah dibubarkan. Namun capaiannya masih dihitung tinggi karena lebih dari 90%.
2. Jumlah koperasi yang berkualitas  
Dari target 30 koperasi dapat terealisasi 65 koperasi sehingga capaiannya melebihi 100%.
3. Jumlah UMKM  
Dari target 18.200 UMKM yang ditargetkan ditahun 2016, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Bontang dapat merealisasikan menjadi 20.792 UMKM. Hal ini dapat tercapai dengan fasilitasi serta pendampingan yang terus menerus di lakukan oleh Bidang Koperasi & UKM.



Anggaran Tahun 2016 Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Bontang mendapatkan dana anggaran Rp. 16.915.493.575 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Belanja Tidak Langsung = 6.826.104.888
  - b. Belanja Langsung = 10.089.388.687
- telah terealisasi pemanfaatan dana sebesar Rp. 16.218.185.942 atau 95,88%, sedangkan sisa dana yang tidak terserap sebesar Rp. 697.307.633 atau 4,12 %

Pada tahun 2016 ada 11 program dan 29 kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Dinas Perindagkop & UMKM Kota Bontang berdasarkan DPA Perubahan bulan Nopember 2016. Dari 11 program dan 29 kegiatan telah terlaksana dengan capaian fisik sebesar 99,76% dan capaian keuangan 95,88% per desember 2016.

Program dan Kegiatan yang memenuhi target (100%)

1. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif
  - a. Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Koperasi dan UKM, dari rencana anggaran sebesar Rp. 135.829.400 terealisasi sebesar Rp. 135.829.400 atau 100%, dengan output fasilitasi terhadap 15 pelaku UMKM dan 9 aparat studi komparatif.
2. Program Peningkatan Kelembagaan Koperasi dan Pengembangan Sistem Pendukung UMKM
  - a. Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi, dari rencana anggaran sebesar Rp. 6.612.500 terealisasi sebesar Rp. 6.592.500 atau 99,70% dengan output dari 40 KSP/KJKS/ dan USP/ UJKS koperasi yang rencananya dilakukan penilaian kesehatan KSP/KJKS/ dan USP/ UJKS terealisasi 40 KSP/KJKS/ dan USP/ UJKS koperasi yang dinilai kesehatannya tiap bulan sehingga capaiannya 100%.
  - b. Revitalisasi Koperasi Yang Tidak Aktif dari rencana anggaran sebesar Rp. 18.430.000 terealisasi sebesar Rp. 14.430.000 atau 78,30% dengan output jumlah koperasi yang direncanakan dimonitoring perbaikan pendataan kinerja sebanyak 30 koperasi terealisasi sebanyak 30 koperasi atau 100%.
3. Program Pengembangan Sistem Pendukung Bagi UMKM



- a. Monitoring dan Evaluasi Penyelesaian Tunggakan Dana Bergulir dari rencana anggaran sebesar Rp. 70.360.000 terealisasi sebesar Rp. 58.850.000 atau 83,64 % dengan output dari rencana 200 nasabah terealisasi 157 nasabah atau 78,50%
  - b. Pendampingan Pembuatan Legalitas Operasional BLUD UPT DB pola Caneling dari rencana anggaran sebesar Rp. 180.395.000 terealisasi sebesar Rp. 150.221.107 atau 83,27% dengan output rencana jumlah orang yang diikutkan pendidikan dan pelatihan pembuatan BLUD Dana Bergulir 10 orang aparat untuk 2 kali pendidikan terealisasi sebanyak 10 orang dan 2 kali penyelenggaraan pendidikan atau 100%.
4. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
- a. Pameran Dagang Dalam Negeri Tingkat Nasional Propinsi dan Lokal dari rencana anggaran Rp. 430.312.200 terealisasi sebesar Rp. 430.312.200 atau 100% dengan output jumlah pameran nasional yang diikuti sebanyak 2 pameran dengan mengikutkan pelaku usaha sebanyak 4 pelaku dengan capaian 100%
  - b. Monitoring Harga Bahan Pokok dan Barang Strategis dengan output dari 23 komoditi ber SNI yang dimonitoring fluktuasi harganya setiap bulan terealisasi 100%.
5. Program Pembinaan Kaki Lima dan Asongan
- a. Peningkatan Sarana Pasar Tradisional dari rencana anggaran sebesar Rp. 304.017.000 terealisasi sebesar Rp. 304.017.000 atau 100% dengan output jumlah pasar tradisional yang dilakukan penyewaan lahan sebanyak 1 pasar (Pasar sementara Rawa Indah pasca Kebakaran) dan pengelolaan pasar tradisional sebanyak 3 pasar telah dilakukan dengan capaian 100%.
  - b. Pembinaan Pedagang Kreatif Lapangan dari rencana anggaran sebesar Rp. 58.860.000 terealisasi sebesar Rp. 55.440.000 atau 94,19% dengan output jumlah PKL yang akan dibagikan rombongan sebanyak 7 PKL terealisasi sebanyak 7 PKL atau 100%.
6. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah





- a. Fasilitas Pengembangan Dewan Kerajinan Kota Bontang dari rencana anggaran sebesar Rp. 90.245.000 terealisasi sebesar Rp. 88.135.600 atau 97,66% dengan output terlaksananya semua kegiatan Dekranas Kota Bontang Tahun 2016 sebanyak 2 sub kegiatan yaitu pelantikan pengurus Dekranasda dan kegiatan konsultasi masalah Dekranasda.
  - b. Fasilitas Sertifikat Halal Bagi Pelaku IKM dari rencana anggaran sebesar Rp. 48.895.000 terealisasi Rp. 48.885.600 atau 99,98% dengan output dari rencana 17 pelaku IKM yang didampingi untuk mendapatkan sertifikat halal terealisasi sebanyak 17 pelaku IKM yaitu 10 IKM dari Bontang dan 7 IKM dari Propinsi.
  - c. Promosi Produk Unggulan Kota Bontang dari rencana anggaran sebesar Rp. 6.611.000 terealisasi sebesar Rp. 6.611.000 dengan output terlaksananya 1 kegiatan dalam rangka mempromosikan produk unggulan yang ada di Kota Bontang.
  - d. Pendampingan IKM dengan output dari rencana setiap pendamping IKM dapat melakukan monitoring dan pendataan IKM di setiap kelurahan yang ada di Kota Bontang dapat terealisasi 100%
7. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
- a. Pemeliharaan Rutin Berkala PLTS Komunal Kota Bontang dari rencana anggaran sebesar Rp. 211.825.000 dapat terealisasi sebesar Rp. 179.735.500 atau 84,85% dengan output dari jumlah lokasi PLTS komunal yang dilakukan pemeliharaan sebanyak 5 lokasi dapat terealisasi 5 lokasi atau 100%.
8. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 12 Kegiatan dengan perincian sebagai berikut :
- a. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dari rencana anggaran sebesar Rp. 3.900.000 terealisasi sebesar Rp. 3.900.000 atau 100% dengan output dari rencana jumlah benda pos yang tersedia sebanyak 650 buah terealisasi sebanyak 650 buah atau 100%.
  - b. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dari rencana anggaran sebesar Rp. 88.764.000 terealisasi



- sebesar Rp. 76.391.368 atau 86,06% dengan output dari rencana jumlah sarana komunikasi 4, saluran listrik 1, air 1, dan internet 2 line dapat terealisasi semuanya atau 100%.
- c. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, dari rencana anggaran sebesar Rp. 17.000.000 terealisasi sebesar Rp. 14.294.340 atau 84,08% dengan output dari rencana jumlah kendaraan dinas yang terjaga legalitasnya kendaraan roda 2 sebanyak 27 unit, roda 4 sebanyak 8 unit, roda 6 sebanyak 1 unit, roda 3 sebanyak 3 unit terealisasi kendaraan roda 2 sebanyak 27 unit, roda 4 sebanyak 8 unit, roda 6 sebanyak 1 unit, roda 3 sebanyak 3 unit .
  - d. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, dari rencana anggaran sebesar Rp. 19.307.500 terealisasi sebesar Rp. 19.307.500 atau 100% dengan output dari rencana jumlah alat kebersihan yang tersedia sebanyak 18 jenis terealisasi sebanyak 18 jenis atau 100%.
  - e. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, dari rencana anggaran sebesar Rp. 106.208.000 terealisasi sebesar Rp. 106.186.500 atau 99,98% dengan output dari rencana jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia sebanyak 40 jenis, terealisasi sebanyak 40 jenis atau 100%.
  - f. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dari rencana anggaran sebesar Rp. 230.400.000 terealisasi sebesar Rp. 105.350.000 atau 45,72% dengan output dari rencana jumlah barang cetakan yang tersedia sebanyak 18 jenis, terealisasi sebanyak 18 jenis atau 100%.
  - g. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dari rencana anggaran sebesar Rp. 9.930.000 terealisasi sebesar Rp. 9.930.000 atau 100% dengan output dari rencana jumlah komponen listrik sebanyak 10 jenis, terealisasi sebanyak 10 jenis atau 100%.
  - h. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dari rencana anggaran sebesar Rp. 39.040.000 terealisasi sebesar Rp. 39.040.000 atau 100% dengan output dari



rencana jumlah surat kabar yang tersedia 13.332 eksemplar dan buku 10 buah, terealisasi sebanyak 13.332 eksemplar dan buku 10 buah atau 100%.

- i. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dari rencana anggaran sebesar Rp. 22.970.000 terealisasi sebesar Rp. 22.910.000 atau 99,98% dengan output dari rencana jumlah logistik 10 jenis, terealisasi sebanyak 10 jenis atau 100%.
  - j. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman, dari rencana anggaran sebesar Rp. 107.550.000 terealisasi sebesar Rp. 107.550.000 atau 100% dengan output dari rencana jumlah kotak jamuan yang tersedia 6.180 kotak makan dan snack terealisasi sebanyak 6.180 kotak atau 100%.
  - k. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah, dari rencana anggaran sebesar Rp.748.066.000 terealisasi sebesar Rp. 741.596.691 atau 99,99% dengan output dari rencana jumlah perjalanan dinas dalam dan luar daerah sebanyak 12 bulan terealisasi perjalanan dinas dalam dan luar daerah sebanyak 12 bulan atau 100%.
  - l. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran, dari rencana anggaran sebesar Rp. 6.650.492.081 terealisasi sebesar Rp. 6.393.992.019 atau 96,14% dengan output dari rencana jumlah tenaga honorer sebanyak 140 orang terealisasi sebanyak 140 orang dan TTP PNS 65 orang terealisasi 65 orang atau 100%.
9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dari 3 Kegiatan dengan perincian sebagai berikut :
- a. Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor rencana anggaran sebesar Rp. 10.000.000 terealisasi sebesar Rp. 9.911.000 atau 99,11% dengan output dari rencana jumlah pemeliharaan gedung sebanyak 1 paket terealisasi sebanyak 1 paket atau 100%.
  - b. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional dari rencana anggaran sebesar Rp. 299.500.000 terealisasi sebesar Rp. 298.998.000 atau 99,83% dengan output



dari rencana pemenuhan BBM dan pemeliharaan kendaraan 1 tahun dapat terealisasi pemenuhan BBM dan pemeliharaan kendaraan 1 tahun atau 100%.

- c. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor dari rencana anggaran sebesar Rp. 50.000.000 terealisasi sebesar Rp. 49.742.000 atau 99,48% dengan output dari rencana jumlah pemeliharaan AC dan komputer selama 1 tahun dapat terealisasi 1 tahun atau 100%.

10. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal rencana anggaran sebesar Rp. 74.545.006 terealisasi sebesar Rp. 74.545.006 atau 100% dengan output dari rencana untuk bimtek, diklat dll untuk 1 tahun terealisasi sebanyak 1 tahun atau 100%.

11. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyusunan Renstra SKPD anggaran sebesar Rp. 49.324.000 terealisasi sebesar Rp. Rp. 49.324.000 atau 95,26% dengan output dari rencana 1 dokumen Renstra terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100%.

## **II.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD**

Perkembangan sector industri dan perdagangan memberikan dampak langsung pada perkembangan ekonomi secara makro pada perekonomian Kota Bontang. Mengingat Kota Bontang menjadi tempat bernaungnya industri-industri yang besar sehingga secara makro di harapkan memberikan peran sebagai penggerak utama (prime mover) perekonomian daerah.

Kinerja pembangunan pada pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan urusan perdagangan selama periode 2011 - 2016 nampak melalui indikator sebagai berikut :

**Tabel II.2.1**



**Aspek Pelayanan Umum Dalam Bidang Perdagangan Kota  
Bontang  
Tahun 2011 - 2016**

No	Uraian	Tahun					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Kontribusi sector Perdagangan terhadap PDRB						
	Dengan Migas	1,36	1,35	1,47	1,55	3,47	5,91
	Tanpa Migas	8,86	8,42	8,21	7,96	6,52	4,09
2.	Ekspor bersih Perdagangan (US\$)	11.241.967.200,5	10.217.256.807,4	9.167.419.977,15	7.837.147.802,85	4.410.351.863,53	3.022.771.488,29
3.	Cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informal	719	750	616	616	799	616

Kontribusi sector perdagangan di Kota Bontang dengan migas terhadap PDRB pada tahun 2011-2014 masih di bawah 2%. Sedangkan pada tahun 2015 kontribusinya meningkat menjadi 3,47% dan 5,91 % di tahun 2016. Sedangkan kontribusi sector perdagangan terhadap PDRB tanpa migas selama tahun 2011-2016 menurun. Nilai ekspor yang tertinggi pada tahun 2011 sebesar 11,24 miliar dollar. Nilai kontribusi sector perdagangan terhadap PDRB selalu fluktuatif disebabkan oleh banyak faktor diantaranya data ekspor dari perusahaan yang ada di Bontang serta nilai dollar yang selalu berubah-ubah. Pelayanan dukungan promosi maupun peningkatan kualitas produk unggulan terus dilakukan seiring dengan semakin ketatnya persaingan.

Kinerja pembangunan pelayanan urusan perindustrian selama periode 2011-2016 pada masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel II.2.2 sebagaimana berikut ini :



**Tabel II.2.2**  
**Aspek Pelayanan Umum Dalam Bidang Perindustrian Kota Bontang**  
**Tahun 2011 - 2016**

No	Uraian	Tahun					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Kontribusi sector Industri terhadap PDRB						
	Dengan Migas	94,96	90,00	95,06	95,06	94,69	94,69
	Tanpa Migas	67,62	68,12	69,27	69,27	70,43	70,43
2.	Kontribusi Industri Rumah Tangga terhadap PDRB sector Industri	0	0,01	0,01	0,01	0,05	3,76
3.	Pertumbuhan Industri						
	Industri Besar	20,00	6,14	0,00	-16,67	-14,28	0
	Industri Rumah Tangga	3,33	3,00	3,27	13,44	42,48	6,54
4.	Cakupan bina kelompok pengrajin	35,41	42,11	45,45	50,00	83,00	67,00

Kontribusi sector industri memberikan sumbangan terbesar terhadap PDRB Kota Bontang baik dengan migas maupun tanpa migas. Untuk PDRB dengan migas sector industri di dominasi oleh industri migas. Dari tahun 2011-2012 kontribusi industri terhadap PDRB dengan migas menurun dan tetap untuk 2 tahun berikutnya dan turun lagi pada tahun 2015. Hal ini disebabkan adanya perusahaan yang tutup.

Pertumbuhan industri rumah tangga selama 5 tahun terakhir meskipun mengalami kenaikan tapi sangat kecil. Dari tahun 2011 s/d 2014 masih sama yaitu 0,01% dan baru pada tahun 2016 mengalami kenaikan menjadi 3,76 % . Cakupan Bina Kelompok pengrajin cenderung mengalami kenaikan. Hal ini bisa terwujud karena jumlah tenaga pendamping yang cukup sehingga pembinaan terhadap pengrajin terus



menerus dilakukan. Disamping itu munculnya kelompok kelompok pengrajin baru turut mempengaruhi kenaikan ini. Walaupun demikian, pengembangan industri harus tetap dilaksanakan dengan tetap mengedepankan tumbuhnya iklim investasi yang kondusif serta ramah lingkungan.

Kinerja pembangunan pada aspek pelayanan umum di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah di mana diharapkan mampu membantu dalam pergerakan perekonomian masyarakat terutama para pengusaha kecil dan menengah.

Pembangunan dan pembinaan koperasi telah menunjukkan dampak yang positif, meskipun belum mampu mengubah struktur perekonomian daerah. Kinerja pembangunan pada aspek pelayanan umum di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah selama periode 2011-2016 sebagai berikut :

**Tabel II.2.3**  
**Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bontang Tahun 2011-2016**

No	Uraian	Tahun					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)
1	Persentase Koperasi Aktif	76,86	84,40	82,57	86,61	85,34	83,76
2	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	68	103	85	77	80	80
3	Jumlah BPR/LKM	3	3	3	3	3	4
4	Usaha Mikro dan Kecil	13.40	16.55	16.553	18.17	18.20	20.792
		1	3		6	6	

Persentase koperasi aktif di Kota Bontang mengalami kenaikan dari tahun 2011 sebesar 76,86% menjadi 86,61% di tahun 2014. Namun tahun 2015 dan tahun 2016 turun menjadi 85,34% dan 83, 76. Hal ini disebabkan adanya koperasi simpan pinjam yang mengalami kredit macet sehingga tidak aktif lagi serta koperasi yang mempunyai pinjaman pada LBDB mengalami kegagalan usaha dan akhirnya tidak aktif juga. Jumlah UKM non BPR/LKM UKM pada tahun 2011 sebanyak 68 unit naik menjadi 80 unit tahun 2015 meskipun rentang tahun 2011 s/d 2014 naik



turun. Usaha mikro dan kecil cenderung mengalami kenaikan dari 13.401 di tahun 2011 menjadi 20.792 di tahun 2016. Koperasi, usaha kecil dan menengah di Kota Bontang terus ditingkatkan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi.

### **II.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD**

Isu-isu strategis yang ada di Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Bontang adalah sebagai berikut

- a. Data base IKM, UKM dan Koperasi yang kurang up to date menjadikan sumber data dan informasi guna pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat dalam hal ini IKM,UKM,Koperasi dan sektor usaha masyarakat lainnya menjadi kurang optimal.
- b. Kurangnya kualitas dan kuantitas produksi bagi pelaku industri sehingga kalah bersaing dengan IKM dari luar daerah
- c. Masih kurangnya SDM aparatur yang memiliki skill dan kompetensi yang sesuai dengan Tupoksinya
- d. Masih terbatasnya fasilitasi bagi peningkatan akses permodalan bagi koperasi dan UMKM
- e. Keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bontang
- f. Koperasi, UKM dan IKM masih cenderung menggantungkan fasilitas pada pemerintah

### **II.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD**

Rancangan Awal RKPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan Kota Bontang Tahun 2018 disusun berdasarkan atas Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan Kota Bontang Tahun 2017-2021 dan membandingkan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian RPJMD Kota Bontang Tahun 2016 - 2021 yang berdasarkan pertimbangan atas kinerja pencapaian target Renstra, dan target kinerja yang dicapai oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan Kota Bontang dengan arahan Walikota terkait dengan prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan Kota Bontang.





Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan harus dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian misi pembangunan daerah yaitu menjadikan Kota Bontang sebagai *Creative City* melalui pengembangan kegiatan perekonomian berbasis sektor maritim.

Sehingga dalam mendukung misi tersebut maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan Kota Bontang menetapkan 14 program prioritas yang terdiri atas 4 program pendukung dan 10 program pembangunan, serta menetapkan 33 Kegiatan prioritas yang terdiri dari 11 kegiatan pendukung dan 22 kegiatan pembangunan. Program prioritas tersebut adalah :

1. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi,
2. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah
3. Program Pengembangan dan Sistem Pendukung Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
4. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
5. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
6. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
7. Program Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan
8. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
9. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
10. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif

Secara lengkap Review terhadap rancangan Awal RKPD tahun 2018 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan Kota Bontang dapat dilihat pada Tabel II.4.1 dan rumusan kebutuhan program dan kegiatan tahun 2018 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan Kota Bontang dapat dilihat pada Tabel II.4.2 pada lampiran Renja 2018 ini.

## **II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait dengan kebutuhan dan harapan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan



tahunan yang sedang direncanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan Kota Bontang. Usulan program dan kegiatan ini berasal dari usulan masyarakat yang mengusulkan melalui Musrembang yang dilaksanakan mulai dari tingkat Kelurahan, tingkat Kecamatan, sampai dengan tingkat Kota. Serta hasil rakor Dinas Perindagkop dan UMKM se-Kalimantan Timur di Bontang, juga menjadi acuan serta sinkronisasi antara program dan kegiatan antara pemerintah pusat, provinsi serta kab/kota.

Hasil usulan program/kegiatan tersebut diinventarisasi yang memiliki kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan Kota Bontang selanjutnya akan dipilah lagi berdasarkan prioritas, fokus kebijakan tahun 2018, Indikator Kinerja yang ingin dicapai, dan implikasi terhadap capaian renstra SKPD maupun terhadap RPJMD Kota Bontang. Secara lengkap usulan program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel II. 5.1 pada lampiran Renja 2018 ini.



## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN**

#### **III.1. TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL**

Pencapaian visi Presiden dalam periode 2015-2019 oleh Kementerian Koperasi dan UKM akan difokuskan untuk mendukung pelaksanaan Misi Pembangunan Nasional yaitu mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Misi tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan norma-norma pembangunan yang difokuskan pada (i) perbaikan kualitas hidup masyarakat; (ii) pengurangan ketimpangan; dan (iii) peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah-bawah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pelaksanaan misi dan norma-norma pembangunan tersebut diharapkan dapat membangun dan memperkuat Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan yang mencakup dimensi pembangunan yang inklusif dan dapat memperkecil kesenjangan antarkelompok pendapatan dan kesenjangan antar-wilayah.

Prioritas Nasional Tahun 2018 telah tersirat di dalam Rancangan Awal 2018 BPP Bappenas yaitu :

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Perumahan dan pemukiman



4. Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata
5. Ketahanan Energi
6. Ketahanan Pangan
7. Penanggulangan Kemiskinan
8. Infrastruktur, Konektifitas dan Kemaritiman
9. Pembangunan Wilayah
10. Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan

Pembangunan yang ditujukan kepada Koperasi dan UMKM diharapkan menghantarkan pada tujuan Kementerian Koperasi dan UKM yaitu Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang berdaya saing dan berkontribusi pada peningkatan perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat berlandaskan semangat wirausaha, kemandirian koperasi dan keterpaduan.

Dengan mempertimbangkan kondisi internal maupun eksternal, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan telah menetapkan 7 arah kebijakan prioritas yang merupakan arah kebijakan pembangunan nasional 2015-2019 , yaitu

1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkelanjutan merupakan landasan utama untuk mempersiapkan Indonesia lepas dari posisi sebagai negara berpendapatan menengah menjadi negara maju. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan ditandai dengan terjadinya transformasi ekonomi melalui penguatan pertanian, perikanan dan pertambangan, berkembangnya industri manufaktur di berbagai wilayah, modernisasi sektor jasa, penguasaan iptek dan berkembangnya inovasi, terjaganya kesinambungan fiskal, meningkatnya daya saing produk ekspor non-migas terutama produk manufaktur dan jasa, meningkatnya daya saing dan peranan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah



(KUMKM), serta meningkatnya ketersediaan lapangan kerja dan kesempatan kerja yang berkualitas.

2. Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sumber Daya Alam (SDA) yang Berkelanjutan.

Arah kebijakan peningkatan pengelolaan dan nilai tambah SDA adalah dengan meningkatkan kapasitas produksi melalui peningkatan produktivitas dan perluasan areal pertanian, meningkatkan daya saing dan nilai tambah komoditi pertanian dan perikanan, meningkatkan produktivitas sumber daya hutan, mengoptimalkan nilai tambah dalam pemanfaatan sumber daya mineral dan tambang lainnya, meningkatkan produksi dan ragam bauran sumber daya energi, meningkatkan efisiensi dan pemerataan dalam pemanfaatan energi, mengembangkan ekonomi kelautan yang terintegrasi antarsektor dan antarwilayah, dan meningkatnya efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan keragaman hayati Indonesia yang sangat kaya.

3. Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan.

Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk memperkuat konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan, mempercepat penyediaan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman (air minum dan sanitasi) serta infrastruktur kelistrikan, menjamin ketahanan air, pangan dan energi untuk mendukung ketahanan nasional, dan mengembangkan sistem transportasi massal perkotaan.

Kesemuanya dilaksanakan secara terintegrasi dan dengan meningkatkan peran kerjasama Pemerintah-Swasta

4. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, Mitigasi Bencana Alam dan Penanganan Perubahan Iklim.

Arah kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana dan perubahan iklim adalah melalui peningkatan pemantauan kualitas lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan hidup;



mengurangi risiko bencana, meningkatkan ketangguhan pemerintah dan masyarakat terhadap bencana, serta memperkuat kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

5. **Penyiapan Landasan Pembangunan yang Kokoh.**

Landasan pembangunan yang kokoh dicirikan oleh meningkatnya kualitas pelayanan publik yang didukung oleh birokrasi yang bersih, transparan, efektif dan efisien; meningkatnya kualitas penegakan hukum dan efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi, semakin mantapnya konsolidasi demokrasi, semakin tangguhnya kapasitas penjagaan pertahanan dan stabilitas keamanan nasional, dan meningkatnya peran kepemimpinan dan kualitas partisipasi Indonesia dalam forum internasional.

6. **Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan.**

Sumberdaya manusia yang berkualitas tercermin dari meningkatnya akses pendidikan yang berkualitas pada semua jenjang pendidikan dengan memberikan perhatian lebih pada penduduk miskin dan daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar); meningkatnya kompetensi siswa Indonesia dalam Bidang Matematika, Sains dan Literasi; meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan, terutama kepada para ibu, anak, remaja dan lansia; meningkatnya pelayanan gizi masyarakat yang berkualitas, meningkatnya efektivitas pencegahan dan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, serta berkembangnya jaminan kesehatan.

7. **Mengembangkan dan Memeratakan Pembangunan Daerah.**

Pembangunan daerah diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan wilayah Jawa-Bali dan Sumatera bersamaan dengan meningkatkan kinerja pusat-pusat pertumbuhan wilayah di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua;

menjamin pemenuhan pelayanan dasar di seluruh wilayah bagi seluruh lapisan masyarakat; mempercepat pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan; membangun kawasan



perkotaan dan perdesaan; mempercepat penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah; dan mengoptimalkan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.

Sedangkan untuk program prioritas pada masing masing kementerian adalah sebagai berikut :

***Kementerian Koperasi dan UKM***

1. Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi
2. Program Penguatan Kelembagaan Koperasi:
3. Program PeningkatanPenghidupanBerkelanjutan Berbasis Usaha Mikro
4. Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi
5. Program Penguatan Kelembagaan Koperasi:
6. Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro

Lebih lanjut dalam kebijakan dan program kementerian Koperasi & UKM tahun 2015 - 2019 menetapkan kegiatan strategi unggulan yaitu :

- a. Penataan data koperasi dan UMKM
- b. Fasilitasi penguatan dan peranan KUD
- c. Fasilitasi pembebasan biaya akta notaris
- d. Fasilitasi usaha kemudahan perizinan usaha mikro dan kecil
- e. Diklat dan penumbuhan serta pengembangan wirausaha
- f. Fasilitasi pembiayaan KUKM
- g. Fasilitasi dukungan pemasaran melalui LLP-KUKM
- h. Revitalisasi pasar tradisional
- i. Dukungan program swasembada pangan dan kesejahteraan masyarakat pesisir

Dari arah kebijakan sampai program dan kegiatan yang dilakukan oleh kementrian KUKM diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, kelayakan dan nilai tambah Koperasi dan UMKM sehingga mampu tumbuh ke skala yang lebih besar (“naik kelas”) dan berdaya saing.



Arah kebijakan tersebut akan dilaksanakan melalui lima strategi sebagaimana dituangkan dalam RPJMN tahun 2015-2019 yaitu (i) peningkatan kualitas sumber daya manusia; (ii) peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan; (iii) peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran; (iv) penguatan kelembagaan usaha; dan (v) kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha.

### ***Kementerian Perindustrian***

1. Program Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Berbasis Agro
2. Program Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Kimia, Tekstil Dan Aneka
3. Program Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Alat Transportasi, Mesin, Elektronika, Dan Alat Pertahanan
4. Program Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah
5. Program Percepatan Penyebaran Dan Pemerataan Pembangunan Industri
6. Program Peningkatan Ketahanan Dan Kerjasama Internasional Di Bidang Industri
7. Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
8. Program Pengembangan SDM Industri Dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian
9. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kementerian Perindustrian
10. Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian

Tujuan yang ingin dicapai oleh Kementerian Perindustrian dalam membangun industri yaitu Terbangunnya Industri yang Tangguh dan Berdaya Saing. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan industri tersebut, Kementerian Perindustrian telah menetapkan sasaran-sasaran strategis yang dibagi ke dalam 3 (tiga) perspektif yaitu: 1)





perspektif pemangku kepentingan; 2) perspektif proses internal; dan 3) perspektif pembelajaran organisasi. Kementerian Perindustrian juga telah menetapkan indikator-indikator dari masing-masing sasaran strategis tersebut sehingga pencapaian dari masing-masing sasaran strategis dapat terukur dan dimonitor. Untuk mencapai sasaransasaran strategis tersebut Kementerian Perindustrian melaksanakan 10 (sepuluh) program yang merupakan penjabaran dari arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional.

Lingkup dari program-program yang dilaksanakan mencakup kegiatan-kegiatan dalam rangka pembangunan industri prioritas, pengembangan perwilayahan industri, pengembangan sumber daya industri, pengembangan industri hijau, pengembangan standardisasi industri, dan pengembangan Industri Kecil dan Menengah.

### ***Kementerian Perdagangan***

1. Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri
  - a. Peningkatan Kelancaran Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
  - b. Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Distribusi Perdagangan
  - c. Pengembangan kelembagaan dan pelaku usaha Perdagangan
  - d. Pemberdayaan dagang kecil menengah dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri
  - e. Pengembangan perdagangan dalam negeri daerah
  - f. Peningkatan tata kelola yang baik
2. Program Peningkatan Perlindungan Konsumen
  - a. Pengembangan Standardisasi Bidang Perdagangan
  - b. Pengembangan Kebijakan dan Pemberdayaan Perlindungan Konsumen
  - c. Peningkatan Efektivitas Pengawasan Barang Beredar
  - d. Peningkatan Tertib Ukur



- e. Peningkatan Pengawasan Mutu Barang
  - f. Peningkatan Kelembagaan Perlindungan Konsumen Daerah
  - g. Peningkatan tata kelola yang baik
3. Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri
- a. Pengelolaan ekspor produk pertanian dan Kehutanan
  - b. Pengelolaan ekspor produk industri dan Pertambangan
  - c. Pengelolaan fasilitasi ekspor dan impor
  - d. Pengelolaan impor
  - e. Peningkatan pengamanan dan perlindungan akses Pasar
  - f. Pengembangan fasilitasi perdagangan luar negeri Daerah
  - g. Dukungan sektor perdagangan terhadap pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
  - h. Peningkatan tatakelola yang baik

Kementerian Perdagangan telah berusaha mengantisipasi dinamika perekonomian dunia yang masih penuh resiko dan sulit diprediksi dengan mengeluarkan berbagai kebijakan yang mendorong peningkatan nilai tambah melalui proses hilirisasi produk manufaktur yang didukung oleh iklim usaha yang kondusif. Dengan senantiasa berusaha untuk menjawab setiap tantangan yang dihadapi dan mengambil kesempatan atas potensi yang dimiliki. Sehingga kontribusi akan sangat mempengaruhi hal tersebut.

### **III.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD**

Tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan Kota Bontang tahun 2018 adalah berdasarkan atas isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja pada Renstra Dinas.

Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan Kota Bontang Tahun 2018 di selaraskan pada Visi dan Misi Walikota Bontang yaitu pada Visi Menguatkan Bontang sebagai kota maritim berkebudayaan industri yang bertumpu pada kualitas sumber daya manusia dan lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat.



Dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan tupoksinya mendukung Misi Walikota Bontang pada Misi 3 yaitu Menjadikan Kota Bontang sebagai *Creative City* melalui Pengembangan kegiatan perekonomian berbasis sektor maritim; Bontang sebagai *Creative City* merupakan hasil dari pengembangan pengetahuan yang intensif dan strategi kreatif dalam peningkatan kualitas sosial-ekonomi, ekologi, daya kompetitif kota

Dengan **Tujuan** :

1. Meningkatkan peran sektor non migas dalam struktur ekonomi daerah

Sasaran :

- a. Meningkatnya kapasitas dan produktivitas koperasi
- b. Meningkatnya sarana perdagangan dan sistem distribusi perdagangan serta ekspor
- c. Meningkatnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB

2. Peningkatan daya saing ekonomi Kota Bontang

Sasaran :

- a. Meningkatnya usaha kecil menengah
- b. Meningkatnya cakupan pemenuhan kebutuhan gas untuk rumah tangga
- c. Peningkatan fasilitas dana bergulir

### **III.3. PROGRAM DAN KEGIATAN**

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan telah menetapkan Program dan Kegiatan yang mendukung visi dan misi pemerintah Kota Bontang sebagai berikut :

#### **Program Wajib**

11. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi,
  - a. Penilaian Kesehatan Koperasi
  - b. Revitalisasi Koperasi



- c. Monitoring dan evaluasi kelembagaan dan usaha koperasi
12. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah
  - a. Pelatihan Manajemen Kewirausahaan Baru Bagi Pemuda
  - b. Pelatihan/Magang Bagi Pelaku Wirausaha Baru
13. Program Pengembangan dan Sistem Pendukung Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
  - a. Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah
  - b. Monitoring dan Evaluasi Penyelesaian Tunggakan Dana Bergulir
  - c. Sosialisasi Penguatan Modal Usaha Dana Bergulir
  - d. Fasilitasi pengadaan sarana pemasaran produk UMKM
14. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif
  - a. Sosialisasi IUMK
5. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
  - a. Fasilitasi Tertib Ukur, Ukur Ulang, dan Tera Ulang
6. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
  - a. Sosialisasi Regulasi Bidang Perdagangan Luar Negeri
  - b. Pameran Dagang Komoditi Ekspor
7. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
  - a. Peningkatan Sarana Pasar Tradisional
  - b. Pameran Dagang Dalam Negeri Tingkat Nasional, Provinsi dan Lokal
8. Program Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan
  - a. Pengadaan Alat Penunjang Kebersihan Pasar
9. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
  - a. Fasilitasi pelaku IKM dalam Peningkatan SDM
  - b. Fasilitasi Pengembangan Dewan Kerajinan Kota Bontang
  - c. Fasilitasi Sertifikasi Halal Bagi Pelaku IKM
  - d. Pendataan Industri Kecil & Menengah (IKM)
10. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
  - a. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Klinik Kemasan



### **Program Penunjang**

11. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional
  - c. Penyediaan Alat Tulis Kantor
  - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - e. Penyediaan Makanan dan Minuman
  - f. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
  - g. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran
  - h. Peningkatan Kinerja Aparatur
12. Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur
  - a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
13. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
  - a. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
14. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
  - a. Pendidikan dan Pelatihan Formal

Uraian Kegiatan dari masing - masing program dapat dilihat pada tabel III.3.1 pada lampiran Renja 2018 ini.

## **BAB IV PENUTUP**

Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018 di lingkup Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2018 yang tercantum dalam Rencana kerja Pembangunan Daerah Tahun 2018.

Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan tahun 2018 dipastikan masih mempedomani Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan tahun 2016-2021, telah memuat hasil evaluasi



pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, memuat permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta telah mengakomodir usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan koperasi dan usaha kecil menengah, perdagangan, dan industri yang diemban oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan sebagai salah satu SKPD di lingkup Pemerintah Kota Bontang. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan.

Semoga Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan tahun 2018 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kota Bontang tahun 2018. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Ditetapkan di        :  
Bontang  
Tanggal        :        Juni  
2017

**Kepala Dinas  
Koperasi, UKM dan Perdagangan  
Kota Bontang**

**Ir. Mursyid, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610703 198603 1 016